

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung adalah sebuah fenomena yang akan ditemui menjelang tahun ajaran baru dimana setiap sekolah membuka pendaftaran untuk jenjang kelas pertama atau kelas satu di setiap jenjang pendidikan yakni TK/RA, SD, SMP, dan SMA/SMK. Setiap sekolah akan sibuk menyiapkan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memulai menyeleksi semua pendaftar. Proses seleksi yang semakin ketat setiap tahunnya membuat banyak orang tua siswa khawatir, terlebih pada kuota SMA Negeri yang sangat terbatas. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bandung jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) berjumlah 54 sementara Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) berjumlah 27 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berjumlah 17 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) berjumlah 2 sekolah. Dari 27 SMA Negeri sekolah dibagi menjadi 8 rayon sehingga persaingan semakin sulit. Jumlah sekolah negeri ini tidak akan cukup untuk menampung seluruh lulusan SMP negeri dan swasta yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan kuota daya serap SMA negeri. Berikut ini jumlah sekolah yang ada di Kota Bandung meliputi sekolah negeri dan swasta (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah di Kota Bandung Tahun Ajaran 2016/2017

| Jenjang Sekolah | Status Sekolah | | Jumlah |
|---------------------------|----------------|--------|--------|
| | Negeri | Swasta | |
| Sekolah Dasar | 633 | 190 | 823 |
| Sekolah Menengah Pertama | 54 | 182 | 236 |
| Sekolah Menengah Atas | 27 | 109 | 136 |
| Sekolah Menengah Kejuruan | 16 | 111 | 127 |

Defy Fatimah, 2017

EFEKTIVITAS SISTEM RAYONISASI DAN ZONASI SEKOLAH DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2016

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bandung jumlah lulusan SMP pada tahun 2015 adalah 37.238 siswa. Sementara kuota SMA negeri hanya 9.018 dan jumlah pendaftar ke SMA Negeri sebanyak 12.671 berarti ada 3.653 siswa yang tidak diterima di SMA negeri (lihat tabel 1.2)

Tabel 1.2 Rincian Pendaftar Siswa Lulusan SMP ke SMA Negeri tahun 2015

| No | Uraian | Jumlah Siswa |
|--|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Lulusan SMP 2015 | 37.238 |
| 2 | Siswa mendaftar ke SMA Negeri | 12.671 |
| 3 | Siswa tidak mendaftar ke SMA Negeri | 24.567 |
| 4 | Siswa yang diterima di SMA Negeri | 9.018 |
| Jumlah siswa yang tidak diterima di SMA Negeri | | 3.653 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2015

Menurut Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2017 jalur masuk sekolah negeri dibedakan menjadi dua yakni akademis dan non akademis. Jalur akademis adalah bagi pendaftar didasarkan pada nilai Ujian Nasional dan non akademis adalah bagi pendaftar dengan kriteria khusus seperti siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), Prestasi bidang tertentu, dan MoU yang dilindungi undang – undang. Prosentase dari setiap jalur berbeda yakni 60% untuk jalur akademis dengan 5% diantaranya diperbolehkan peserta didik dari luar kota, kemudian 40 % untuk jalur non akademis dengan pembagian 20% untuk peserta didik RMP, 10% jalur prestasi dan 10% peserta didik yang masuk dalam MoU/dilindungi undang – undang (lihat tabel 1.3).

Tabel 1.3 Pembagian Kuota Pendaftar Jalur Akademis dan Non Akademis

| No | Jalur | Rincian | Kuota | Jumlah |
|--------|--------------|--------------------------|-------|--------|
| 1 | Akademis | Dalam kota | 55 % | 60% |
| | | Luar kota | 5 % | |
| 2 | Non Akademis | RMP | 20 % | 40% |
| | | Prestasi bidang tertentu | 10 % | |
| | | MoU | 10% | |
| Jumlah | | | | 100 % |

Sumber : Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2017

Defy Fatimah, 2017

EFEKTIVITAS SISTEM RAYONISASI DAN ZONASI SEKOLAH DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

Cara penyeleksian peserta didik baru ini mengalami perubahan setiap tahunnya, dengan adanya peraturan yang dialihkan dari kota ke provinsi maka manajemen pendidikan tingkat SMA/ sederajat yang diambil alih provinsi maka adanya perubahan yang cukup drastis dalam sistem PPDB ketika di tangani oleh pemerintah kota. Kota Bandung sendiri mengalami perubahan pada sistem penerimaan peserta didik baru dari rayonisasi menjadi zonasi pada tahun 2017 (lihat tabel 1.4).

Tabel 1.4 Perubahan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung

| Tahun | Peraturan | Sistem | Keunggulan |
|-------|---------------------------|------------|--|
| 2015 | Perwal No. 361 tahun 2015 | Rayonisasi | Pembagian 8 rayon |
| 2016 | Perwal No.610 tahun 2016 | Rayonisasi | Pembagian 8 rayon |
| | | | Perincian skoring siswa afirmasi dan prestasi |
| 2017 | Pergub No.16 tahun 2017 | Zonasi | Siswa luar kota bisa mendaftar dengan mempertimbangkan jarak hingga 17 km dari sekolah |

Sumber : PPDB Kota Bandung, 2017

Meski kuota peserta didik telah ditentukan tetapi muncul masalah persebaran peserta didik usia sekolah tidak merata. Menurut data dinas pendidikan persebaran usia sekolah tingkat SMA/ sederajat paling banyak berada di kecamatan Lengkong dan terendah berada di kecamatan Panyileukan (lihat tabel 1.5). Persebaran sekolah yang kurang merata membuat daya sekolah sekolah kurang optimal, sekolah pinggiran kurang mendapatkan peminat dan ada kecamatan yang masih sulit mendapatkan pelayanan sekolah negeri.

Tidak meratanya jumlah sekolah dan peserta didik ini membuat pemerintah khawatir akan perkembangan daerah yang tidak merata pula karena kualitas manusia yang kurang terlayani oleh fasilitas. Tahun 2014 dengan wewenang daerah maka Kota Bandung mengatur sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem wilayah atau rayon.

Tabel 1.5 Perbandingan Jumlah Siswa SMA Terbanyak dan Terendah di Kota Bandung

| Kecamatan | | Lengkong | Penyileukan |
|----------------|--------|----------|-------------|
| Jumlah Siswa | Negeri | 8806 | 0 |
| | Swasta | 4585 | 288 |
| Jumlah Sekolah | Negeri | 3 | 0 |
| | Swasta | 9 | 1 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2016

Sistem rayonisasi ini membagi wilayah di Bandung berdasarkan kedekatan sekolah dengan wilayah tempat tinggal menjadi satu region. Tingkat SMA Negeri dibagi atas delapan wilayah dengan mengkategorikan kecamatan, kelurahan dan sekolah. Banyak pihak yang merasa dirugikan dengan sistem rayonisasi ini karena jumlah sekolah tidak sesuai dengan daya tampung dari jumlah penduduk yang berada pada kecamatannya, misalkan pada rayon E dimana ada 9 kecamatan tetapi sekolah yang masuk pada rayon itu hanya tiga sekolah. Jumlah kelurahan pada setiap kecamatanpun berbeda sehingga jumlah penduduk pun berbeda. Ada pula kecamatan yang dipecah menjadi 2 karena kelurahannya di bagi menjadi dua rayon. bisa dilihat pada tabel 1.6 dimana jumlah kecamatan adalah 52 sementara jumlah kecamatan di Kota Bandung hanya berjumlah 30 kecamatan.

Penerimaan kuota dan daya serap sekolah terhadap siswa baru juga menjadi sebuah masalah baru. Sekolah yang menjadi favorit atau sekolah dengan kluster satu semua berada di tengah perkotaan sementara sekolah di pinggiran hanya menempati kluster 3 ini juga membuat banyak orang tua siswa yang mengeluh.

Sebenarnya sistem rayon ini merupakan sistem yang ideal dilansir dari koran pikiran rakyat pada tanggal 27 juni 2015. Rayonisasi mempertimbangkan kesempatan setiap anak untuk mengenyam pendidikan secara adil, sehingga anak – anak disekitar sekolah bisa memperoleh pendidikan di sekolah sekitar rumahnya karena pendidikan itu adalah hak setiap anak.

Tabel 1.6 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung Berdasarkan Rayon

| No | Wilayah/Rayon | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah SMAN |
|----|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | A | 7 | 23 | 4 |
| 2 | B | 7 | 18 | 3 |
| 3 | C | 4 | 13 | 3 |
| 4 | D | 6 | 24 | 3 |
| 5 | E | 9 | 35 | 3 |
| 6 | F | 6 | 20 | 3 |
| 7 | G | 8 | 25 | 4 |
| 8 | H | 9 | 34 | 4 |

Sumber : peraturan walikota bandung nomor 361 tahun 2015

Sebenarnya sistem rayon ini merupakan sistem yang ideal dilansir dari koran pikiran rakyat pada tanggal 27 juni 2015. Rayonisasi mempertimbangkan kesempatan setiap anak untuk mengenyam pendidikan secara adil, sehingga anak – anak disekitar sekolah bisa memperoleh pendidikan di sekolah sekitar rumahnya karena pendidikan itu adalah hak setiap anak. Ilyani (2012) memandang sistem rayonisasi ini dilakukan untuk memberikan prioritas untuk siswa yang memiliki tempat tinggal di sekitar sekolah, seperti yang dikemukannya bahwa “Sistem rayonisasi sekolah merupakan salah satu kebijakan yang dapat menghasilkan dampak pergeseran lokasi tujuan karena kebijakan sistem rayonisasi sekolah (school attendance zone) dilakukan dengan memberikan prioritas mendaftar di suatu sekolah kepada siswa yang memiliki tempat tinggal di sekitar sekolah tersebut”.(hlm.213)

Pemerataan dan pembukaan kesempatan ini diharapkan keberadaan sekolah dapat memajukan masyarakat sekitar dengan pelayanan pendidikan. Rayonisasi juga dibuat untuk mengurangi masalah kemacetan. Kutipan dari media kompas pada tanggal 20 juni 2014 bahwa “Ridwan Kamil, Walikota Bandung menerapkan kebijakan pendidikan dengan konsep pemerataan, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat banyak berupa rayonisasi”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budianto dalam Ilyani (2012, hlm.

Defy Fatimah, 2017

EFEKTIVITAS SISTEM RAYONISASI DAN ZONASI SEKOLAH DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

2010) mengemukakan bahwa kecenderungan pergerakan bertujuan ke arah pusat kota dari lokasi pinggiran (aksesibilitas sulit) kota mencapai 52,95% dan pergerakan penduduk ke pusat kota didominasi oleh pergerakan bekerja dan sekolah (87,5%). Dengan rayonisasi ini siswa tidak akan melakukan perjalanan jauh dan menimbulkan kemacetan karena banyak siswa yang bersekolah di pusat kota. Siswa yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah akan mempunyai waktu yang banyak untuk belajar dan tidak perlu bangun terlalu pagi untuk berangkat ke sekolah. Dengan tertampungnya peserta didik di sekitar sekolah diharapkan kualitas pendidikan di Kota Bandung dapat dirasakan oleh semua warga yang tinggal di tengah kota maupun di perbatasan.

Meratanya jumlah peserta didik diharapkan dapat memenuhi kuota sekolah dan meningkatkan daya serap sekolah di perbatasan. Keberadaan sekolah diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik dan menimbulkan persaingan yang sehat untuk memajukan mutu dan kualitas sekolah dengan pencapaian prestasi. Sistem rayonisasi sudah berjalan tiga tahun yakni penerimaan siswa baru tahun 2014, 2015 dan 2016 sehingga tiga angkatan di sebuah sekolah telah mengalami sistem ini. Dengan berjalanya waktu belum ada dampak yang terlihat dari sistem ini sementara peraturan selalu berubah setiap tahunnya sehingga perlu adanya penelitian mengenai dampak dari diterapkannya sistem rayonisasi ini. Sistem rayonisasi masih menimbulkan pro dan kontra di tahun 2016 kini sistem penerimaan diganti oleh sistem zonasi yang diatur oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Karena belum ada sistem yang ajeg dalam penerimaan peserta didik baru maka penelitian mengenai efektivitas dari sistem rayonisasi dan zonasi bagi kekuatan daya serap sekolah dirasa sangat penting bagi pengembangan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sekolah negeri di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka ada beberapa permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pola persebaran lokasi SMP terhadap lokasi SMA Negeri di Kota Bandung ?
2. Bagaimanakah sistem rayonisasi dan zonasi dalam penerimaan siswa di SMA Negeri di Kota Bandung ?
3. Bagaimanakah efektivitas daya serap sekolah pada sistem rayonisasi dan zonasi di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai beberap tujuan diantaranya yaitu untuk,

1. Menganalisis pola persebaran lokasi SMP terhadap lokasi SMA Negeri di Kota Bandung;
2. Menganalisis sistem rayonisasi dan zonasi dalam penerimaan siswa di SMA Negeri di Kota Bandung;
3. Menganalisis efektivitas daya serap sekolah pada sistem rayonisasi dan zonasi di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kegunaan teoritis untuk mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk mengevaluasi kebijakan sistem penerimaan peserta didik di Kota Bandung.

- b) Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan jumlah kuota sekolah untuk menampung siswa lulusan SMP sekitar.
- c) Bagi penulis, diharapkan penulisan penelitian ini dapat menjadi sarana belajar yang memberikan banyak pengalaman dan memperkaya pengetahuan.
- d) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efektifitas sistem penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri di Kota Bandung.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini adalah gambaran mengenai keseluruhan dari isi skripsi beserta pembahasannya, skripsi ini terdiri atas 5 bab yakni :

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan memaparkan alasan penulisan dan awal masalah penulisan skripsi ini. Pemaparan awal menjelaskan landasan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian bab 2 merupakan kajian pustaka ini adalah kajian kelimuan dan literasi yang menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Kajian teoritis dalam penelitian ini yaitu sistem penerimaan peserta didik baru, teori lokasi sekolah, konsep regionalisasi sekolah, zonasi sekolah, mobilitas peserta didik dan faktor pendorong pemilihan sekolah

Bab III Metode Penelitian

Bagian bab ini meliputi perencanaan penelitian skripsi meliputi desain penelitian, pendekatan geografi yang digunakan, lokasi penelitian, , populasi dan sample, variabel penelitian, teknik pengelolaan data, dan alur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dicapai meliputi pengolahan data serta analisis temuan dan pembahasannya, implementasi penelitian terhadap mata pelajaran pendidikan geografi.

Bab V Kesimpulan Dan Rekomendasi

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran. Saran yang diajukan untuk kepentingan evaluasi instansi pemerintah yang terkait dan untuk diadakannya penelitian selanjutnya.

